

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan di daerah, berdasarkan bagaimana asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Gubernur selaku wakil pemerintahan pusat di daerah dan dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dimana penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui perlimpahan sebagai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kementerian dan lembaga. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 tahun 2007 menyebutkan bahwa untuk tujuan akuntabilitas atas pengelolaan dana-dana yang dikelola oleh provinsi atau kabupaten/kota diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota yang meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Terkait dengan hal ini tersebut maka setiap pengelola keuangan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dipublikasikan dapat disajikan secara wajar terbatas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan. Tanpa pemahaman laporan keuangan yang baik mengakibatkan laporan keuangan yang dipublikasikan terdapat kesalahan material dalam penyajian angka, tidak sesuai dengan pelaporan dan tidak tepat waktu dalam penyampaiannya sehingga berdampak buruk bagi pengguna laporan keuangan dan pihak penyaji laporan itu sendiri (mahmudi , 2010 : 9).

Zetra (2008) mengungkapkan bahwa pemahaman sebagian pejabat penatausahaan keuangan SKPD terdapat mekanisme pengelolaan keuangan masih sangat kurang. Misalnya dapat bendahara penerimaan pada SKPD yang terlambat penyampaiannya pertanggungjawaban yang disebabkan antara lain pengguna anggaran belum tanda tangan. Selain itu, pimpinan kegiatan atau pimpinan SKPD beranggapan bahwa urusan pertanggungjawaban hanyalah tanggung jawab bendahara saja. Padahal dalam permendagri No 13 Tahun 2006 yang diperbaharui permendagri No 21 Tahun 2011 pembagian tugas tersebut sudah diatur dengan jelas.

Sejalan dengan terus bergulirnya reformasi, perubahan peran dari lembaga pemerintah daerah adalah bagi pelayanan publik (public service) secara efektif dan efisien melalui otonomi daerah. Hal ini tentunya akan menuntut peran baru

para penanggungjawab dalam pengelolaan dan pengaturan keuangan dan anggaran daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan target pelayanan pemerintah di butuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu indikator yang menuntut manusia berkualitas adalah tingkat pendidikan sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendidikan tinggi yang akan mampu membantu para pegawai menyelesaikan tugas terutama dalam menyusun anggaran dan laporan keuangan daerah. Mautz dan Sharaf (1961, dalam Rizma Nurchasanah : 1999) menyatakan bahwa untuk dapat menjalankan kewajibannya, ada tiga komponen yang harus dimiliki auditor, yaitu kompetensi, independensi, dan *due professional care* artinya kompetensi yang termanifestasi dalam pendidikan seseorang mempengaruhi kualitas kerjanya.

Pemahaman seorang pegawai terhadap lingkup pekerjaannya, disamping dipengaruhi oleh pendidikannya, juga dipengaruhi oleh masa kerja, dari pegawai tersebut. Dalam indikator psikologi dan auditing menunjukkan bahwa efek dilusi di auditing bisa berkurang oleh auditor yang berpengalaman menyebabkan mereka mengabaikan informasi yang tidak relevan (Sandra,1999 dalam Yudhi dan Meifida : 2006). Dengan kata lain kompleksitas tugas yang di hadapi sebelumnya oleh seseorang akan menambah pengalaman serta pengetahuannya. Pendapat ini didukung oleh Abdolmohammadi dan Wright (1987 dalam Yudhi dan Meifida, 2006) yang menunjukkan bahwa auditor yang tidak berpengalaman mempunyai

tingkat kesalahan yang lebih signifikan di bandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pelatihan, mengingat bahwa melalui pelatihan mampu memberikan tambahan kemampuan dalam menghadapi perubahan maupun penyesuaian sistem kerja dimasa mendatang. Boner dan walker (1999 dalam Yudhi dan Meifida : 2006) mengatakan bahwa peningkatan pengetahuan yang muncul dari pelatihan formal sama bagusnya dengan yang di dapat dari pengalaman khusus. Pelatihan dapat berupa kegiatan-kegiatan seminar, simposium, lokakarya pelatihan itu sendiri dan kegiatan penunjang keterampilan lainnya. Melalui program pelatihan para auditor juga mengalami proses sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang akan di temui (Putri dfan Bandi, 2002 dalam Yudhi dan meifida, 2006).

Dalam ikhtisar hasil Pemeriksaan (IHPS) 1 tahun 2016 (<http://www.bpk.go.id>) Laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016 menggambarkan kenaikan dari hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualiandibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tingkat tanggung jawab dala pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun BPK masih banyak menemukan kelemahan berkaitan dengan pengawasan pengendalian dan pencatatan akuntansi laporan keuangan.

Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidak hematn, dan ketidak efisienan dari hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama lima tahun, dari tahun 2010-2015, BPK memberi opini *unqualified* atau *qualified* dalam presentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD), sebagaimana tersaji dalam 1.1

TABEL 1.1
Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah 2010-2014

No	Jenis Opini	Jumlah Pemda					
		2014		2015		2016	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	WTP	2	5,56	8	22,22	11	30,56
2	WDP	33	91,67	27	75	25	69,44
3	TMP	1	2,78	1	2,78	-	-
4	TW	-	-	-	-	-	-
Jumlah		36	100,00	36	100	36	100,00

Sumber : www.bpk.go.id

Hasil evaluasi oleh BPK diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu periode tahun 2014-2016, baru pada Tahun 2015 hingga 2016 terdapat kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mendapatkan opini WTP dengan presentase yang cukup kecil (22,22%). Sementara itu, kota Semarang selama kurun waktu yang sama baru memperoleh opini WTP pada tahun 2015 dan 2016 (BPK,2015). Mengacu pada perkembangan opini LKPD se Jawa Tengah di atas, maka dapat dikatan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Semarang merupakan salah satu yang terbaik dari total 36 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dimana upaya perbaikan pada 3 tahun antara 2015 sampai dengan 2016 yang memperoleh opini WDP diperbaiki dan dipertahankan pada tahun berikutnya menjadi WTP pada tahun 2015 dan 2016.

Namun demikian, walaupun pada tahun 2015 dan 2016 telah mendapatkan opini WTP, kondisi selama 1 tahun sebelumnya antara 2014 mendapatkan opini WDP perlu mendapatkan perhatian sendiri, dimana ketidak konsistenan kinerja pemerintah kota dalam pelaporan keuanganakan dapat memunculkan kemungkinan menurunnya peringkat opini laporan keuangan pemerintah kota Semarang. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah Kota Semarang belum memenuhi kriteria Standar Akuntansi Pemerintahan yang diharapkan. Disamping itu, fenomena diatas juga mengungkapkan bahwa pemahaman sebagian pejabat penatausahaan keuangan SKPD terdapat mekanisme pengelolaan keuangan masih sangat kurang.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi pegawai dalam menyusun laporan keuangan masih kurang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan yang berakibat pada kemampuan memahami laporan keuangan yang rendah sehingga penyusunan laporan keuangan tidak memenuhi kriteria penilaian.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eriva, Dkk(2015) yang menunjukkan pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan daerah pemerintah Aceh, sedangkan tingkat pendidikan, masa kerja dan jabatan tidak mempunyai pengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan pemerintah Aceh. Hasil penelitian yang dilakukan Almaidar (2015) yang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pemahaman aparatur dilingkup SKPD terdapat proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan masih rendah. Arfan dan Faisal (2014) menunjukkan bahwa masa kerja dan pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good govermancet* di pemerintah Kota Semarang. Hasil penelitian tersebut terjadi ketidakkonsistenan dengan hasil penelitian Bappenas (2006) yang menyimpulkan bahwa jabatan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good govermance*. Maka dengan ini peneliti berniat melakukan penelitian berfokus (uji satu sisi). Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dengan membedakan obyek yang akan di teliti tentang responden pemerintah Kota Semarang. Dengan didukung fakta-fakta yang ada penulis ingin meneliti lebih jauh lagi dan

mendalam tentang “ Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Masa Kerja, dan Jabatan Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah” (Study Empiris Pada perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah).

1.2 Rumusan Masalah

Pemahaman laporan keuangan memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan ataupun jabatan disuatu perusahaan. Pemahaman laporan keuangan merupakan tahap dimana

1. Apakah ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman laporan keuangan Daerah yang terdaftar di Badan Pemeriksaan Keuangan Jawa Tengah ?
2. Apakah ada pengaruh pelatihan terhadap pemahaman laporan keuangan Daerah yang terdaftar di Badan Pemeriksaan Keuangan Jawa Tengah ?
3. Apakah ada pengaruh masa kerja terhadap pemahaman laporan keuangan Daerah yang terdaftar di Badan Pemeriksaan Keuangan Jawa Tengah ?
4. Apakah ada pengaruh jabatan terhadap pemahaman laporan keuangan Daerah yang terdaftar di Badan Pemeriksaan Keuangan Jawa Tengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk untuk menjawab rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan membuktikan pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman laporan keuangan daerah yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah.
2. Menganalisis dan membuktikan pengaruh pelatihan terhadap pemahaman laporan keuangan daerah yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah.
3. Menganalisis dan membuktikan pengaruh masa kerja terhadap pemahaman laporan keuangan daerah yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah.
4. Menganalisis dan membuktikan pengaruh jabatan terhadap pemahaman laporan keuangan daerah yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana pemerintahan sekaligus pembuat laporan keuangan daerah khususnya di kota Semarang diharapkan dapat memahami faktor-faktor yang

mempengaruhi kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga dapat mengevaluasi dan meningkatkan kualitas serta kinerjanya dalam menyajikan laporan keuangan.

2. Bagi masyarakat khususnya di Kota Semarang dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga dapat memberikan masukan-masukan untuk penelitian.
3. Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah wawasan tentang laporan keuangan daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap laporan keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini akan digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berkaitan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan , serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasatn teori serta penelitian terdahulu, lalu kerangka pemikiran dan yang terakhir yaitu hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini penulis menjabarkan tentang variable penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data yang di gunakan, serta metode pengumpulan data, metode analisis, dan tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan pengujian hipotesis penelitian yang tersusun atas deskripsi objek penelitian, analisis atas data, serta interprestasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memberikan kesimpulan atas hasil penelitian, serta mengungkapkan keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

